



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

- Nama : MAULIDYA INDAH JUNICA
- Jabatan : STAF AHLI BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN
- NHK : 800426

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.423.600.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 4.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1336 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , WARISAN Rp. 1.469.600.000
- Tanah Seluas 422 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 2.954.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 68.500.000

- MOTOR, YAMAHA 5D9 (VEGA-ZR) Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
- MOBIL, HONDA STREAM SA 17 CKD MT Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 739.828.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. 121.311.826

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.468.192.669

F. HARTA LAINNYA Rp. 118.817.067

Sub Total Rp. 10.940.249.562

III. HUTANG Rp. 58.648.995

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.881.600.567

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.